◀ Redaksi ▶

Mata Banua
Media Masyarakat Indonesia

■ **Penerbit :**

PT Cahaya Media Utama, Banjarmasin

■ **Telah Terverifikasi Administrasi & Faktual**

oleh Dewan Pers

■ **No 552/DP-Verifikasi K/V/VI/2020**

■ **Terbit Pertama Kali :**

10 Juli 2006

■ **Pemimpin Umum :**

H Fachruddin Nor Ifansyah

■ **Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab:**

Zainal Helmie

■ **Penasehat Hukum :**

Dr. H Fauzan Ramon, SH, MH

■ **Koordinator Peliputan :**

Khaidir Rahman

■ **Manager Produksi :**

Mahmud M Siregar

■ **Asisten Manager Produksi :**

Rizky Yosfia Ruswita

■ **Redaktur :**

HA Fadillah, Suriani, Rudi Setiawan

■ **Staf Redaksi :**

Bambang Santoso, Iin Silvia, Samsu Rizal, Dwiki Hamza Nugraha

■ **Biro-Biro/Perwakilan :**

Rizal Fachrani (**Jakarta**), Herman Hidayat (**Tapin**), Muhammad Yusuf (**Hulu Sungai Utara**), Rasyid Ridho (**Banjarbaru & Kabupatens Baru**), (**Balangan**) Sugianor, Ebet Hadiani (**Kotabaru**) Risma (**Tanah Laut**), Akhmad Alfianor (**Tanah Bumbu**)

■ **Lay Out :**

Akhmad Riza, Ronny Friandy, Amril Sofyan, Taufiqurrahman

■ **Produksi Iklan / IT Web :**

Pahliawan Patria
Ibnu Zulkarnain
Wendy Maiyossi Fahril

■ **Pemimpin Perusahaan :**

H Fachruddin Nor Ifansyah

■ **Sekretaris Perusahaan :**

Gusti Nur Ilma Ariella

■ **Sekretaris Redaksi :**

Pratiwi

■ **Manager Iklan dan Keuangan :**

Hj Noor Diana

■ **Alamat Redaksi/Bisnis/Sirkulasi :**

JI Pekapuran Raya Rt 32 No 87
JI Lingkar Dalam Selatan Banjarmasin
70234

■ **e-Mail :**

redaksi_matabanua@yahoo.com

■ **e-Mail Iklan :**

iklan.matabanua@yahoo.com

■ **Harga Langganan :**

Rp 75.000/bulan dalam kota

■ **Percetakan :**

PT Grafika Wangi Kalimantan
Isi Diluar Tanggung-jawab Percetakan

■ **Tarif Iklan :**

DISPLAY UMUM :
Hitam Putih (BW) : Rp 8.000/mmk
Spot Colour (SC) : Rp 10.000/mmk
Full Colour (FC) : Rp 15.000/mmk

DISPLAY HALAMAN MUKA :
Hitam Putih (BW) : Rp 13.000/mmk
Spot Colour (SC) : Rp 15.000/mmk
Full Colour (FC) : Rp 24.000/mmk

DISPLAY HALAMAN BELAKANG:
Hitam Putih (BW) : Rp 10.000/mmk
Spot Colour (SC) : Rp 13.000/mmk
Full Colour (FC) : Rp 22.000/mmk

IKLAN KOLOM : Rp 8.000/ mmk

IKLAN KELUARGA/
DUKA CITA : Rp 5.000/ mmk

IKLAN BARIS : Rp 5.000/ mmk

■ **Catatan:**

Harga belum termasuk PPN 10%
Pembayaran dimuka

TELEPON PENTING	
Polda Kalsel	3368571
Poltabes Banjarmasin	3251411
Polsek Banjar Tengah	3353003
Polsek Banjar Barat	4412952
Polsek Banjar Timur	3252473
Polsek Banjar Selatan	3261244
Polsek Banjar Utara	3300463
KPPP Poltabes Banjarmasin	3368305
Polres Banjar	4721110
Polresta Banjarbaru	2772266
RSUD Ulin	3257472
RS Ansyari Saleh	3300741
RS Suaka Insan	3352225
RS Islam	3354896
RS DR Soeharsono	3368422
RS Siaga	3253111
RS Sari Mulia	3252570
RSUD Banjarbaru	4772380
PMK Hippindo	7500911
Rescue 911	9110911

REDAKSI menerima sumbangan tulisan opini, artikel maupun surat pembaca lainnya. Panjang tulisan opini/ artikel maksimal 3 (tiga) halaman kuarto, diketik dua spasi. Sedangkan surat pembaca maksimal 1 (satu) halaman kuarto.Semua isi tulisan opini dan artikel bukan mencerminkan sikap redaksi dan merupakan tanggung jawab penulisnya. Redaksi berhak mengedit tulisan sepanjang tidak mengubah esensi yang ada. Semua tulisan harus dilengkapi dengan identitas diri yang masih berlaku, dikirim Alamat Redaksi/ Bisnis/ Sirkulasi:JI Pekapuran Raya Rt 32 No 87 JI Lingkar Dalam Selatan Banjarmasin 70234

Tantangan Pengetasan Kemiskinan Pasca Pandemi Covid-19

oleh:
Eddy Erwan Nopianoor
(Statistisi Madya BPS Banjar)

DAMPAK pandemi covid-19 terhadap penduduk miskin dapat terlihat dari meningkatnya jumlah penduduk miskin pada Maret 2021. Meskipun jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan pada September 2021, namun jumlah penduduk miskin masih lebih banyak jika dibandingkan dengan sebelum pandemi covid-19 terjadi. Harapan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan seperti pada masa sebelum pandemi akan menghadapi tantangan yang cukup berat, hal ini disebabkan karena banyak perubahan sosial ekonomi yang terjadi karena dampak pandemi tersebut. Pandemi telah melonjakkan permasalahan kemiskinan, jenis dan dimensinya, serta jumlah dan kedalamannya. Pengentasan kemiskinan kedepan akan semakin berat, sehingga dibutuhkan upaya yang luar biasa dan tidak akan bisa dengan upaya sekedarnya saja. Mengembalikan kondisi kemiskinan pada kondisi sebelum masa pandemi akan menjadi tugas yang berat dan melelahkan.

Kemiskinan dan Pengangguran
Sektor ketenagakerjaan merupakan sektor yang merasakan dampak cukup besar karena pandemi covid-19. Pembatasan mo-

bilitas dalam wujud PSBB dan PPKM memukul keras dunia usaha formal terutama pada sektor pariwisata, industri pengolahan dan konstruksi. Akibatnya ledakan pengangguran pun tidak dapat dihindari. Berdasarkan data BPS, terjadi peningkatan angka pengangguran dari 7,1 juta orang (5,23 persen) pada Agustus 2019 menjadi 9,1 juta orang (6,49 persen) pada Agustus 2021. Korelasinya, angka kemiskinan pun ikut melonjak dari 9,22 persen (24,8 juta jiwa) pada September 2019 menjadi 10,14 persen (27,5 juta jiwa) pada Maret 2021. Peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi sebagai akibat pembatasan mobilitas yang menyebabkan beberapa sektor usaha mengalami kemunduran bahkan ada yang akhirnya gulung tikar. Industri pun ikut terdampak dengan melakukan rasionalisasi jam kerja bahkan sebagian terpaksa melakukan PHK terhadap karyawannya.

Terbatasnya kesempatan kerja akhirnya memaksa penduduk untuk masuk ke dunia kerja sektor informal. Akibatnya, semakin banyak tenaga kerja memasuki sektor yang memberi upah rendah. Pekerja bebas pada sektor pertanian dan nonpertanian, utamanya buruh tani dan buruh bangunan, mengalami pertambahan jumlah yang signifikan. Begitu pula tenaga kerja sektor informal dan pekerja berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar mengalami lonjakan jumlah yang cukup besar.

Kesehatan dan Pendidikan
Selain krisis kesehatan akibat virus covid-19 yang menimbulkan banyak korban jiwa, pandemi juga menciptakan krisis kesehatan lain yang berpotensi meledak di masa depan. Krisis kesehatan tersebut adalah memburuknya asupan gizi masyarakat dan berhentinya layanan kesehatan dasar.

Berkurangnya penghasilan dan daya beli keluarga miskin sebagai akibat ekonomi dari pandemi, akan membuat keluarga miskin menghadapi krisis paling serius yaitu kerawanan pangan. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa hampir 10 persen pengeluaran

keluarga miskin digunakan untuk membeli rokok. Sehingga kebutuhan gizi keluarga menjadi salah satu pengeluaran yang dikorbankan oleh keluarga miskin.

Memburuknya asupan gizi masyarakat pada masa pandemi merupakan hal yang nyata. Kondisi ini ditunjukkan oleh kasus kelahiran anak dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yang mengalami peningkatan selama periode pandemi. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS menunjukkan, BBLR pada tahun 2019 di perkotaan dan perdesaan sebesar 10,38 persen dan 12,49 persen, mengalami peningkatan pada 2021 menjadi 11,43 persen dan 13,37 persen.

Pelayanan kesehatan dasar utamanya bagi kelompok rentan seperti anak usia dini, mengalami banyak kendala selama masa pandemi. Pembatasan mobilitas, kecemasan masyarakat akan penularan virus serta tumbangnya tenaga kesehatan karena terpapar virus, membuat layanan kesehatan dasar menjadi terganggu bahkan ada sebagian yang menghentikan sementara operasionalnya. Hal ini mengakibatkan permasalahan kesehatan pada kelompok tersebut cenderung meningkat dan tidak terdeteksi. Pada saat puncak pandemi, banyak masyarakat membatalkan rencana berobat atau periksa ke fasilitas kesehatan dan enggan mendapat perawatan meski mengalami keluhan kesehatan. Sebagian juga disebabkan terganggunya operasional fasilitas kesehatan karena penuh dengan pasien Covid. Pada Maret 2021 (data Susenas), sebanyak 18,4 persen anak usia 0-23 bulan ditunda dan tidak diberikan imunisasi. Sekitar 59,4 persen menyebutkan alasan karena kekhawatiran tertular Covid-19 dan karena fasilitas kesehatan tidak beroperasi.

Selain kesehatan, pendidikan khususnya pada anak keluarga miskin juga menerima dampak yang tidak kalah besar. Kebijakan untuk menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) dan menggantikannya dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar dari rumah (BDR) sejak Maret 2020

telah membuat kualitas pendidikan khususnya kelompok bawah semakin tertinggal. Pelaksanaan PJJ cenderung tidak efektif dan terjadi ketimpangan kemampuan yang lebar antara sekolah dan peserta didik. Kemampuan kelompok bawah untuk mengikuti PJJ cenderung rendah karena keterbatasan ekonomi. Hal ini menyebabkan terjadinya learning loss (hilangnya pengalaman dan capaian belajar) dan juga learning poverty (hilangnya kemampuan belajar) pada siswa kelompok ekonomi lemah. Jika terus terjadi, kondisi ini akan melemahkan daya saing siswa dan semakin sulit memperbaiki kesehatannya di masa depan. Pemerintah harus melakukan intervensi yang kuat untuk memulihkan learning loss dan learning poverty terutama pada siswa miskin dan rentan. Pelaksanaan PTM harus bisa segera diwujudkan untuk memastikan tidak semakin jauh keteringgalan yang mereka alami.

Antisipasi Pemerintah
Pengendalian pandemi sangat menentukan dalam kinerja penanggulangan kemiskinan. Belum ada tanda akan berakhirnya pandemi, bahkan dihadapkan pada ancaman gelombang ketiga. Meskipun demikian, pemerintah harus lebih memberi perhatian dengan kebijakan afirmatif kepada kelompok miskin, dengan memastikan bahwa mereka memperoleh layanan pendidikan, kesehatan dan bantuan sosial yang cukup selama masa pandemi belum berakhir. Ekonomi keluarga miskin juga perlu mendapat perhatian dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok dan stabilitas harga. Bukan merupakan tugas yang ringan bagi pemerintah, apalagi sebagian harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, seperti minyak goreng dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Kebijakan pemerintah dengan menaikkan cukai rokok dan rencana kenaikan harga elpiji juga akan membuat tantangan tersebut semakin berat. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, maka target pemerintah untuk menekan angka kemiskinan seperti sebelum pandemi akan susah terwujud.

Korupsi, Koalisi dan Kooperatif Politik

oleh:
Melvin Yunespi Haripama
Nahasiswa Hukum Tatanegara/UIN Imam Bonjol Padang

KORUPSI, Koalisi dan Kepentingan Politik. Merupakan kata yang sudah tidak asing lagi terdengar, terbaca dan terjadi di negara Indonesia. Masyarakat Indonesia sudah tidak heran jika hal ini terjadi berulang kali meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mencegahnya agar tidak terjadi, seperti didirikannya salah satu lembaga negara yaitu Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sejak tahun 2002.

Korupsi adalah suatu perbuatan buruk yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Seperti pengelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi dan ekonomi.

Korupsi biasanya dilakukan dengan bantuan berbagai pihak guna untuk melancarkan berbagai aksi yang dapat dilakukan sehingga terbentuk suatu koalisi atau persekongkolan untuk urusan tidak baik demi mendapatkan berbagai keuntungan dan pihak yang membantu melancarkan akan mendapatkan fee atas bantuan kelancaran yang dilakukannya.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus korupsi yang terbilang cukup banyak menurut data KPK di tahun 2020 sampai dengan 2021 saja tercatat 608 penindakan yang dilakukan, sehingga dirikannya lembaga KPK tersebut. mirisnya tindak pidana korupsi ini tidak sedikit dilakukan oleh para pejabat pemegang kekuasaan yang telah merugikan cukup banyak keuangan negara yang tidak dipercayai oleh masyarakat.

Tentunya hal ini sangat berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat, yang menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, karena tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik sehingga muncul anggapan tidak adanya kerja sama dan persaudaraan yang tulen antara pemimpin dengan masrakat itu sendiri.

Bahkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus korupsi beserta koalisi itu sendiri ikut serta dalam kemurungan masyarakat akan tindak pidana korupsi yang terus terjadi. Kasus KPK tidak henti-hentinya dirundung masalah.

Seperti yang baru-baru ini terjadi pada kasus suap penyidik KPK yang dilakukan oleh Walikota Tanjungbalai. Pada kasus ini Syahril diduga menyuap penyidik KPK Stefanus Robin Pattuju sekitar 1,5 Miliar untuk menghentikan proses penyidikan kasus lelang jabatan yang dilakukan oleh syahril, dan KPK telah menetapkan salah satu pihak lainnya yaitu Maskur Hussain sebagai seorang lawyer (pengacara) yang membantu Robin dalam kasus ini pada 22 April 2021.

Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju melakukan pertemuan dengan pengacara Maskur Husain di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin Jakarta Selatan untuk bisa membantu kasus yang dihadapi Syahril.

Dalam pertemuan tersebut, Azis Syamsudin memperkenalkan keduanya karena diduga Wali Kota Tanjungbalai Syahril memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap Penyidikan. Stepanus Robin Pattuju bersama Maskur sepatuk untuk membuat komitmen dengan Syahril terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK.

Yang kemudian Syahril menyetujui permintaan keduanya tersebut dengan mentransfer uang sebanyak 1,5 milyar yang dilakukan 59 kali transfer melalui rekening bank Riefka Amalia teman Stepanus Robin Pattuju.

Dalam kasus ini telah terjadi praktek korupsi kooperatif politik yang dilakukan secara sistematis oleh Syahril dengan menjalankan koalisi bersama Stepanus Robin Pattu dan Maskur Husain untuk kepentingan politik Syahril dan kepentingan masing-masing selaku Walikota Tanjungbalai ditengah kasus yang menjratnya.

Masyarakat sangat prihatin dengan kasus korupsi yang seperti ini masih saja terjadi di pusat dan daerah, kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik.

Kasus korupsi yang terjadi di daerah seperti kasus tersebut melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagaimana mungkin meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah kalau pejabat dan kepala daerah terlitik kasus korupsi?

Korupsi demi kepentingan politik juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemulyaan dalam masyarakat.

Dalam masyarakat ada suatu keinginan yang ingin dicapai, kemudian hukum dijadikan sebagai alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbwaa kearah tujuan yang dikehendaki. Keberadaan hukum dalam masyarakat adalah sebagai suatu fenomena yang harus dioperasikan dalam masyarakat.

Korupsi dengan koalisi secara kooperatif dan kejahatan sejenisnya adalah musuh bersama. Jangan lelah perang korupsi dan kepentingan politik, jalankan praktik good governance dengan baik dan kebijakan transparansi dikedepankan maka tingkat kejahatan korupsi di negara Indonesia tidak akan terealisasikan.

Memperhatikan Anak-anak Terlantar

oleh:
Nanang Qosim, M.Pd
Dosen Poltekkes Kemenkes Semarang, Peneliti di Lembaga Lajnah Ta'lim wan Nasyr NU Kota Semarang

BANYAK orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah kurang perhatian, dan bahkan acuh terhadap anak-anak yang matanya cekung, badannya kerempeng dan paras tubuhnya seperti orang tak bertenaga, bahkan masa depan mereka semakin diabaikan. Mereka adalah anak-anak bangsa yang mempunyai hak jaminan hidup nyaman tapi dikebiri. Tidak heran apabila dalam perjalanannya banyak di antara mereka yang lumpuh karena kekurangan gizi. Masa depan hidup pun seakan hanya tinggal harapan yang tak pasti.

Di negeri ini, tidak sedikit anak yang mengalami nasib kurang menguntungkan. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ada sekitar 3,1 juta anak di seluruh dunia yang meninggal akibat kekurangan gizi setiap hari. Kebanyakan dari mereka berusia di bawah 5 tahun. Hal ini juga jamak terjadi di pelbagai daerah yang ada di Indonesia.

Menurut data Studi Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan, angka stunting secara nasional menurun dari 37,2% pada 2013 menjadi 30,8% pada 2018. Me-

nurut Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada 2019, angka tersebut menurun menjadi 27,7%. Penurunan angka stunting telah dinyatakan sebagai program prioritas nasional. Saat ini, Pemerintah terus bergerak menata perangkat pelaksanaan percepatan pencegahan stunting dan menyusun Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) 2018-2024. Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, juga menetapkan target angka stunting nasional agar bisa turun mencapai 14 %.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga tinggi anak terlalu pendek untuk usianya. Kondisi kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah lahir. Namun stunting baru terlihat setelah anak berusia dua tahun. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, dan menurunkan produktivitas. Jumlah kasus stunting tertinggi umumnya berada di Indonesia bagian timur (www.mca-indonesia.go.id).

Penyebab paling dominan dari semua itu tidak terlepas dari kekurangan gizi. Anak-anak yang seharusnya diopani dengan memberi makanan yang bergizi ternyata di balik. Anak-anak kita banyak yang diberi gizi pas-pasan, bahkan sering makan makanan yang tidak bergizi.

Pada saat itulah anak-anak akan penyakit-an yang pada gilirannya akan mengalami kelumpuhan. Masa menyenangkan yang seharusnya didapat berganti dengan rasa menyesakkan dan menyengsarakan karena mereka hanya bisa meringuk di pangkuan sang ibu.

Pada dasarnya tanggung jawab paling utama dalam hal ini adalah pihak orangtua. Tapi, kalau orangtua dalam kondisi ekonomi tidak memungkinkan, maka menjamin kesehatan kehidupan anak adalah tanggung jawab bersama. Karena bagaimana pun hak anak adalah hal fundamental yang tidak hanya menjadi tanggung jawab personal keluarga, tapi semua elemen masyarakat dan pemerintah wajib ikut andil dalam memenuhi hak-hak asasi anak.

Dalam Undang-Undang tentang Anak

Tahun 2002 telah disebutkan hak-hak anak yang harus dipenuhi, termasuk jaminan kesehatan. Pasal 7 ayat (2) b menyebutkan dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 menyatakan, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal tersebut menandakan bahwa kesehatan adalah hak anak yang paling pokok. Untuk memenuhi hak anak tersebut adalah tanggung jawab orangtua. Tapi apabila orangtua tidak cukup biaya alias sangat miskin, maka masyarakat dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk untuk memenuhi hak kesehatan anak. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bazar kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Saat ini, rasa tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak ini kurang melekat dalam diri masyarakat dan negara. Masyarakat dan pemerintah seakan masih belum terгуah kesadaranannya secara penuh. Anak-anak seakan dianggap oleh kebanyakan masyarakat kita sebagai anugerah Tuhan yang harus diperhatikan oleh keluarganya sendiri.

Di samping itu, juga merebaknya penyakit lumpuh pada anak tidak terlepas dari minimnya kesadaran pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam faktanya, kesehatan anak itu terganggu tidak lepas dari kondisi ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan membuat banyak orangtua tidak bisa memenuhi hak-hak anak. Pemerintah tidak cermat dan sigap dalam mendeteksi keluarga tipe ini. Dengan tanpa uluran tangan dari masyarakat dan perhatian khusus dari pemerintah, hak-hak anak akan terpengkas di bawah himpitan tekanan ekonomi orangtua.

Pemerintah belum secara serius mengalokasikan anggaran untuk terpenuhinya hak anak-anak. Satu contoh kasus saja adalah

program wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang selama ini implementasinya masih setengah hati. Padahal di negara lain masalah anak menjadi perhatian yang cukup serius.

Seperti Thailand, sesuai dengan Rencana Pembangunan Sosial dan Ekonomi Tahap Sembilan, sasaran anggaran tertuju pada anak-anak dan remaja, kaum miskin, orang cacat, dan penganggur. Begitu juga di Chili, undang-undang anggaran di negara tersebut menjamin peningkatan anggaran 25% alokasi dana untuk mendukung lembaga-lembaga perlindungan anak.

Dengan demikian, melihat fenomena merebaknya pemangkasan terhadap hak-hak anak, terutama dalam aspek kesehatan dan pendidikan, penting bagi orangtua, masyarakat dan pemerintah introspeksi diri untuk sama-sama menyadari akan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak mereka yang terlantar.

Orangtua yang memang berlatar ekonomi tidak mampu untuk memenuhi hak-hak fundamental anak jangan hanya diam dan membiarkan keadaan hak anak terpengkas, tapi harus berusaha bagaimana orangtua mampu memenuhi hak anak lewat bantuan dari masyarakat atau pemerintah setempat. Banyak cara kalau memang orangtua sudah tidak mampu lagi memenuhi hak-hak anak. Seperti yang telah tercantum dalam undang-undang anak adalah dengan diasuh keluarga lain.

Pihak masyarakat, atau keluarga lain seharusnya menyadari ketika melihat fenomena orangtua yang tidak mampu lagi untuk memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam menjamin hak-hak anak. Artinya, keluarga lain yang merasa mampu harus menyadari keberadaannya sebagai orang yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk terlibat dalam memenuhi hak-hak anak.

Suksesnya pola relasi antara keluarga yang satu dengan yang lain juga tidak terlepas dari peran serta pemerintah. Banyak orangtua dan masyarakat yang tidak sadar akan hak-hak anak sehingga mereka juga merasa kecepetan. Pemerintah mestinya terlibat dalam proses pemenuhan tanggung jawab dan harus mampu memberi pencerahan, penyadaran, dan payung hukum perlindungan hak-hak anak.